

DAFTAR BACAAN :

Skripsi atau Tesis

Bagus Oktafian Abrianto, *Tanggung Gugat Pemerintah Atas Pelaksanaan Peraturan Kebijakan Di Indonesia*, Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 62.

Irene Yasvinka Saragih.2019.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Asing [Skripsi].Jakarta.UPN Veteran Jakarta.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 2003, h. 14.

Lukmanul Hakim, “Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan”, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskasi Universitas Widyagama malang dan Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, 2010, hlm. 48.

Buku

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 103.

Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, PT Grasindo, Jakarta, 2005, h. 30.

Aloysius Uwiyono *et al*, “*Asas Asas Hukum Perburuhan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2016 , h. 70.

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, h. 77.

Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, h. 63.

Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, h. 174.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1979, h. 431 dalam Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, h. 174.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, “*Hukum Internasional Kontemporer*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 193.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perera Pidana Buku 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 158.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.13, 2017, h. 60.

S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, h. 154.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003, h. 121.

Jurnal

Atik Krustiyati, “Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2013, h.138.

Ahmad Firdaus Sukomono, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi”, *Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8 No. 2, April 2017, h. 57.

Andi Khadafi , “Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK di Lakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Bejina Resources (PBR)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , Vol 11 , No 1 , 2016, h. 14.

Dian Ferricha, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No. 1, Juli 2016, h. 146.

Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, Juli 2020, h. 104.

Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho, “Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Perampokan Dan Perampokan Laut

Berdasarkan Hukum Internasional”, *Era Hukum* , Vol 2 , No 2 , 2017 , h. 5.

Hadi Subhan, “Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Jakarta, 2012, h.20.

Fatkul Muin, “Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 no.1, Juni 2015, h. 23.

Hafriz Resa Damarsidi, “Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan”, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4 , Tahun 2017 , hlm.40.

Khikmatul Heny Masitoh, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, h.3.

Lalu Husni, “Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, Maret 2011, h. 24.

Mardianis, “Penerapan Tanggung Jawab Negara dalam Pengaturan Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 atas Kerugian Pihak Ketiga”, *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*, h. 91.

Okky Cahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, No. 4 Vol. 18, Desember 2018, h. 546.

Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Ph.D.,”Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional”, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, “Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2 Vol. 9, Juli 2012, h. 172.

Riza Amalia et al, “Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional”, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm. 6.

R.Herlambang Perdana Wiratraman, *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA*, Vol. 20, No. I, Januari 2005, h. 9.

Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum* , No. 2 Vol. 18, April 2011, h. 217.

Toshiro Fuke, *Comparative Studies on Governmental Liability in East and Southeast Asia*, Kluwer Law International London/Boston, 1999, h.1.

Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2, Januari 2017, h. 166.

Internet

Hukum Online.com, “Minimnya Perlindungan Buruh Migran, Tiga Kelompok Ini Rentan Eksploitasi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27971c29346/minimnya-perlindungan-buruh-migran--tiga-kelompok-ini-rentan-eksploitasi?page=2>, di akses pada 28 Desember 2020.

ILO.org, Sekilas ILO di Indonesia, <https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf>, diakses pada 25 Desember 2020.

M. Ambari, “Benarkah Perlindungan Pemerintah pada ABK Indonesia Masih Tidak Maksimal?”, <https://www.mongabay.co.id/2018/10/05/benarkah-perlindungan-pemerintah-pada-abk-indonesia-masih-tidak-maksimal/>, di akses pada 15 Juni 2020.

Nasib Pelaut Perikanan Indonesia di luar negeri sangat menyedihkan, dimuat dalam situs resmi Kompasiana http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64, di akses pada 17 Juni 2020.

Situs BP2MI, “Kepala BP2MI: Viralnya ABK, Momentum Perbaikan Tata Kelola”, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-viralnya-abk-momentum-perbaikan-tata-kelola>, di akses pada 26 Desember 2020.

Satrio Nugroho, “Jumlah TKW Terus Meningkat dan Dominan Dalam Tiga Tahun Terakhir”, <https://indonesiaglobalworker.com/2019/08/05/jumlah-tkw-terus-meningkat-dan-dominan-dalam-tiga-tahun-terakhir/>, di akses pada 28 Desember 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2002

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan

Peraturan Pmerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia